



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 188/O/2002

**TENTANG
PENYERAHAN PENETAPAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
YANG DIALIHKAN MENJADI PERANGKAT DAERAH**

**PROPINSI SUMATERA UTARA
KOTA PADANG SIDEMPUAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
TAHUN 2002**

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 188 /O/2002

TENTANG

PENYERAHAN PENETAPAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
YANG DIALIHKAN MENJADI PERANGKAT DAERAH

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyerahkan penetapan organisasi dan tatakerja unit pelaksana teknis sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi perangkat daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai pembentukan Kabinet Gotong Royong;

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 109/M.PAN/5/2001 tanggal 3 Mei 2001 tentang Kelembagaan Kantor Wilayah, Kantor Departemen, Kantor Perwakilan Lembaga Pemerintah Non Departemen serta Unit Pelaksana Teknis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyerahkan penetapan organisasi dan tatakerja unit pelaksana teknis sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional kepada Gubernur, Bupati, atau Walikota, yang satuan organisasi, pembiayaan, prasarana, personil, dan arsipnya telah dialihkan kepada Daerah yang bersangkutan.
- KEDUA** : Nama dan lokasi unit pelaksana teknis sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional mengenai organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sekolah dapat dijadikan pedoman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 28 Oktober 2002

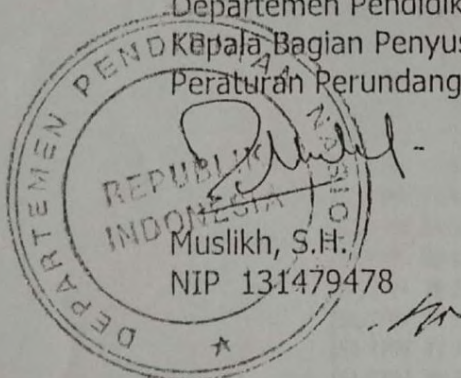
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
 TTD
 A. MALIK FADJAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
 A: smpenyerahan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional,
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, semua Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Direktur Jenderal anggaran, Departemen Keuangan,
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi setempat,
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat,
10. Gubernur setempat,
11. Bupati/Walikota setempat,
12. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 188/O/2002 TANGGAL 28 OKTOBER 2002

DAFTAR NAMA DAN LOKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
YANG DISERAHKAN KE DAERAH

NO	DAERAH OTONOM	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI / KECAMATAN
1	2	3	4
	D.K.I. JAKARTA		
1	KOTA JAKARTA PUSAT	TK NEGERI JL. BESUKI NO. 4	MENTENG
2		TK NEGERI JL. CILACAP NO.5	MENTENG
3		TK NEGERI JL. TEGAL NO. 10	MENTENG
4		TK NEGERI LATIHAN I MENTENG	MENTENG
5		TK NEGERI MERDEKA TIMUR	GAMBIR
6		SDN PERCOBAAN	GAMBIR
7		SDN PERCOBAAN JL. BASUKI NO. 4	MENTENG
8		SDN PERCOBAAN JL. CILACAP NO.	MENTENG
9		SDN PERCOBAAN JL. TEGAL NO. 10	MENTENG
10		SLTPN 1 JAKARTA	MENTENG
11		SLTPN 2 JAKARTA	JOHAR BARU
12		SLTPN 4 JAKARTA	SAWAH BESAR
13		SLTPN 5 JAKARTA	SAWAH BESAR
14		SLTPN 8 JAKARTA	MENTENG
15		SLTPN 10 JAKARTA	KEMAYORAN
16		SLTPN 17 JAKARTA	SAWAH BESAR
17		SLTPN 18 JAKARTA	MENTENG
18		SLTPN 28 JAKARTA	JOHAR BARU
19		SLTPN 38 JAKARTA	TANAH ABANG
20		SLTPN 39 JAKARTA	GAMBIR
21		SLTPN 40 JAKARTA	TANAH ABANG
22		SLTPN 47 JAKARTA	CEMPAKA PUTIH
23		SLTPN 59 JAKARTA	KEMAYORAN
24		SLTPN 60 JAKARTA	GAMBIR
25		SLTPN 64 JAKARTA	SAWAH BESAR
26		SLTPN 70 JAKARTA	TANAH ABANG
27		SLTPN 71 JAKARTA	CEMPAKA PUTIH
28		SLTPN 72 JAKARTA	GAMBIR
29		SLTPN 76 JAKARTA	JOHAR BARU
30		SLTPN 77 JAKARTA	CEMPAKA PUTIH
31		SLTPN 78 JAKARTA	KEMAYORAN
32		SLTPN 79 JAKARTA	KEMAYORAN
33		SLTPN 93 JAKARTA	KEMAYORAN
34		SLTPN 94 JAKARTA	GAMBIR
35		SLTPN 118 JAKARTA	CEMPAKA PUTIH
36		SLTPN 119 JAKARTA	KEMAYORAN
37		SLTPN 137 JAKARTA	CEMPAKA PUTIH
38		SLTPN 156 JAKARTA	JOHAR BARU
39		SLTPN 181 JAKARTA	TANAH ABANG
40		SLTPN 183 JAKARTA	KEMAYORAN
41		SLTPN 216 JAKARTA	SEKEN
42		SLTPN 228 JAKARTA	KEMAYORAN
43		SLTPN 269 JAKARTA	KEMAYORAN
44		SLTPN 273 JAKARTA	TANAH ABANG
45		SLTPN 280 JAKARTA	MENTENG
46		SMUN 1 JAKARTA	SAWAH BESAR
47		SMUN 4 JAKARTA	GAMBIR
48		SMUN 5 JAKARTA	KEMAYORAN
49		SMUN 7 JAKARTA	TANAH ABANG
50		SMUN 10 JAKARTA	SAWAH BESAR
51		SMUN 20 JAKARTA	SAWAH BESAR
52		SMUN 24 JAKARTA	TANAH ABANG
53		SMUN 25 JAKARTA	GAMBIR
54		SMUN 27 JAKARTA	JOHAR BARU

NO	DAERAH OTONOM	NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS	LOKASI / KECAMATAN
1	2	3	4
1	KOTA PADANG SIDEMPUAN	SLTPN 1 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
2		SLTPN 2 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
3		SLTPN 3 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN SELATAN
4		SLTPN 4 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
5		SLTPN 5 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN SELATAN
6		SLTPN 6 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
7		SMUN 1 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
8		SMUN 2 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
9		SMUN 3 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN SELATAN
10		SMUN 4 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
11		SMUN 5 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN SELATAN
12		SMUN 6 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
13		SMKN 1 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA
14		SMKN 2 PADANG SIDEMPUAN	PADANG SIDEMPUAN UTARA